

KEDAULATAN POLITIK & EKONOMI

Oleh Nurcholish Madjid

Tegaknya hukum dan peraturan — sebagai salah satu tujuan pengawasan dan pengimbangan — dalam penyelenggaraan kenegaraan modern mengharuskan adanya diferensiasi antara berbagai lembaga kenegaraan (menurut kekhususan bidangnya, terutama kekhususan eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Tugas utama sistem pemerintahan, dan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalannya, ialah kemampuan memelihara ketertiban, atau mengatur dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi ketertiban itu sendiri memerlukan parameter-parameter, berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum. Maka dalam menjalankan tugasnya menegakkan ketertiban, pemerintah secara keseluruhan berkewajiban mempertahankan agar parameter-parameter itu dipegang teguh dan dilaksanakan dengan taat.

Oleh karena kekuasaan itu sendiri, khususnya kekuasaan eksekutif, memiliki fasilitas dan prasarana untuk melanggar ketentuan dengan dampak yang amat luas terhadap kehidupan masyarakat (*power tends to corrupt*), maka sistem pengawasan dan pengimbangan harus terlebih dahulu, dan terutama, diciptakan antara ketiga unsur kekuasaan itu sendiri, yaitu unsur-unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengawasan dan pengembangan akan terwujud jika masing-masing dari ketiga unsur kekuasaan itu independen satu dari yang lain, dan bebas melaksanakan pengawasan pengembangan satu sama lain.

Secara khusus, berkenaan dengan usaha menegakkan hukum dan peraturan, sistem peradilan yang independen dan berfungsi secara penuh merupakan jaminan kelembagaan yang paling kuat bagi tegaknya hukum dan peraturan. Sebaliknya jika sistem peradilan tidak dapat lepas dari pengaruh pemerintahan eksekutif, juga pengaruh luar mana pun, akan mengakibatkan runtuhnya ketentuan hukum dan peraturan.

Dalam hubungan interaktif antara ketiga unsur kekuasaan itu, badan legislatif dituntut benar-benar memenuhi fungsinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Badan legislatif yang berfungsi penuh karena absah melalui pemilihan umum yang bebas, terbuka, dan demokratis, merupakan faktor pengimbang dan pengawas terhadap keseluruhan proses dan struktur politik yang terjadi, sebagai realisasi kedaulatan rakyat.

Pada hakikatnya, kedaulatan rakyat adalah inti partisipasi umum rakyat dalam kehidupan bernegara. Dan adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita-cita kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana dinyatakan dalam nilai-nilai kesepakatan luhur dalam Mukaddimah UUD 1945 akan sirna tak bermakna tanpa adanya partisipasi umurn rakyat.

Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain pun adalah kelanjutan kedaulatan rakyat itu. Hal ini terbukti dengan nyata sekali dalam saat-saat kritis negara menghadapi ancaman. Pemerintah mana pun pada gilirannya harus bersandar kepada rakyat untuk menanggulangi ancaman terhadap negara, dan dalam keadaan yang sulit itu akan tampil dengan nyata siapa sebenarnya kalangan anggota masyarakat luas yang benar-benar berkepentingan akan keselamatan bangsa dan negara.

Karena itu kedaulatan politik tidak mempunyai nilai yang bermakna tanpa kedaulatan di bidang-bidang lain, khususnya di bidang ekonomi. Sesungguhnya, kedaulatan ekonomi inilah yang diharapkan lahir dari adanya keadilan sosial, yang merupakan tujuan

sebenarnya kita bernegara. Sebab dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh rasa ikut-punya dan rasa ikut-serta oleh semua.

Pelajaran paling pahit dari pengalaman kita bernegara masa-masa terakhir ini muncul karena diabaikannya praktik-praktik kezaliman sosial, sehingga berjalan dengan bebas dan merajalela. Kesalahan dalam politik ekonomi dan pembangunan selama dua atau tiga dasawarsa terakhir ini, sekalipun tidak dapat diramalkan dengan pasti sebelumnya, telah berujung pada hancurnya kedaulatan rakyat dan negara berhadapan dengan tekanan dunia luar. Dan yang paling parah ialah kerugian yang menimpa rakyat, pendiri, pembentuk, dan pemilik negara sebenarnya.

Pada titik ini ide reformasi yang dipelopori mahasiswa dan kalangan perguruan tinggi membentuk lingkaran penuh dan sempurna. Reformasi bertitik-tolak pada komitmen masing-masing pribadi pada nilai kehidupan yang luhur, dan berakhir pada komitmen kita semua pada semua usaha mewujudkan keadilan sosial, dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Demi itu semua, pembangunan ekonomi harus diubah dari pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, menjadi pola dan orientasi ekonomi rakyat patriotik. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memperhatikan segenap potensi nasional kita, baik dalam artian sumber daya manusia maupun dalam artian sumber daya alam. Kita harus menjadikan potensi-potensi nyata itu sebagai modal dan pangkal pembangunan ekonomi rakyat patriotik. Pembangunan ekonomi nasional harus diubah arah sedemikian rupa sehingga lebih berpijak pada kenyataan-kenyataan nasional kita yang sebenarnya, dan tidak mengembara mengikuti gelembung fantasi, khayal, dan iming-iming kemewahan dunia luar, yang nyata telah berakhir dengan ancaman terhadap kedaulatan kita.

Ketangguhan ekonomi rakyat hanya akan terwujud apabila kita mampu secara mandiri mengolah kekayaan alam kita, dengan tingkat kreativitas setinggi-tingginya: yaitu kemandirian ekonomi

nasional pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis industri rakyat. [❖]